



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUD dr. RASIDIN PADANG
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MERCUBAKTIJAYA PADANG
PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) KEBIDANAN
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.41/PKS/BKS-PDG/2023

Nomor : 326/AU/STIKes-MCB/VI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20 - 06 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **HERLIN SRIDIANI** : Direktur RSUD dr. RASIDIN Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Air Paku Sungai Sapih Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/ 245/ SK - BKPSDM/ 2021 tanggal 13 April 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. RASIDIN, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **ZULFITA** : Ketua Program Studi Strata Satu (S-1) Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang, berkedudukan di Jalan Jamal Jamil Pondok Kopi Nanggalo Padang-25146 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Strata Satu (S-1) Kebidanan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang berdasarkan surat Ketua STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang Nomor 249/AU/STIKes-MCB/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 hal: Penunjukan Perjanjian Kerjasama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan STIKes MERCUBAKTIJAYA Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan

Paraf II	Paraf I

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi

Nomor : 130.27/MOU/BKS-PDG/2020

Nomor : 510/AU/STIKes-MCB/XII/2020

2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis dalam rangka menghasilkan tenaga kebidanan yang berkualitas dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bidang Kebidanan bagi dosen dan mahasiswa.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi :

- a. Melakukan praktek klinik kebidanan dan manajemen kebidanan;
- b. Melakukan penelitian bidang kebidanan; dan
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. menerima surat permohonan tentang pelaksanaan kegiatan yang dilampiri dengan jadwal, nama dosen dan mahasiswa dari PIHAK KEDUA minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan;

Paraf II	Paraf I
	

- b. mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- c. melakukan verifikasi terhadap dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- d. menetapkan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- e. mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang akan, sedang dan telah terlaksana;
- f. mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. memperoleh kontribusi berupa penerimaan atas tarif layanan dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. mengembalikan dosen dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. menyediakan pembimbing klinik untuk mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan pendampingan/bimbingan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan hasil penilaian akhir praktik sesuai format dan waktu yang disepakati; dan
- e. PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara sendiri-sendiri atau secara bersama.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mengajukan permohonan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
- b. memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU sesuai kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memperoleh pendampingan/bimbingan dan hasil evaluasi dari PIHAK KESATU terhadap dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. menghadiri rapat terkait kegiatan yang akan, sedang dan telah terlaksana yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- c. mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;

- d. membayar tarif layanan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara sendiri-sendiri atau secara bersama.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Fotocopy Sertifikat Akreditasi Institusi dan Prodi;
 - c. SK dosen Pembimbing Akademik; dan
 - d. Buku Panduan Pelaksanaan Kegiatan.
- (2) PIHAK KESATU melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU menetapkan jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan dan daya tampung sumber daya yang tersedia dengan rasio pembimbing klinik dan peserta didik adalah 1:5 (satu banding lima)
- (4) PIHAK KESATU menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (5) PIHAK KEDUA membayar tarif layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) PARA PIHAK melakukan serah terima dan orientasi dosen atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (8) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri.
- (9) PIHAK KESATU mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

RSUD dr. Rasidin Padang

Up. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Jalan Aie Paku Sei. Sapih

Telepon 081363106625 (Ns,Afriyani, S.Kep.M.Kep)/

Fax (0751) 495330

Email : rsudr.rasidin2017@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan MERCUBAKTIJAYA Padang

Up. Tim Kerjasama Program Studi S1 Kebidanan

Jalan Jamal Jamil Pondok Kopi Nanggalo Padang

Telepon (0751) 442295, Fax (0751) 442286,

Hp. 081363463921 (Gina Muthia, S.SiT., M.Keb),

Email : gnmth84@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ZULFITA
Ketua Program Studi

PIHAK KESATU,



HERLIN SRIDIANI
Direktur